

ISSN. 2502-7832



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2016

**“EVALUASI PILKADA SERENTAK:
MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DAN
KOMUNIKASI PARTISIPATORIS
MENUJU PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

SABTU, 9 APRIL 2016 - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471 Telp (0352) 481124 Fax (0352) 462796

ISSN. 2502-7832

Prosiding

SEMINAR NASIONAL & CALL PAPERS 2016

“Evaluasi Pilkada Serentak : Membangun Kesadaran Politik Dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”

Penyunting

1. Dr. Nurul Imam
2. Dr. Bambang Widiyahseno
3. Drs. Jusuf Harsono
4. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
5. Dra. Niken Lestarini, M.Si
6. Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos, M.AP
7. Robby Darwis Nanution, S.IP, M.A
8. Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Penerbit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo - Jawa Timur – Indonesia

Alamat

Jl. Budi Utomo No. 10, Ponorogo – Jawa Timur – Indonesia
<http://semnas.fisip.umpo.ac.id/>

DINAMIKA POLITIK LOKAL

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUH Ponorogo	i
Daftar Isi	vii
A. KOMUNIKASI DAN KEARIFAN LOKAL	
EVALUASI PILKADA SERENTAK: PROBLEMATIKA DARI TRANSISI KE KONSOLIDASI	
Gun Gun Heryanto	1
PROBLEMATIKA KONSELOR SEBAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONSELING (STUDI KASUS KONSELING SEBAYA DI UNIVERSITY RESIDENCE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)	
Rila Setyaningsih	15
POLITISASI ADAT HIBUA LAMO: PRODUK POLITIK CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MALUKU UTARA	
Frets Alfret Goraph	33
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA	
Iqbal Aidar Idrus , Titin Purwaningsih	49
POLITIK INFORMAL DALAM PEMILUKADA 2015 DI BANGKA SELATAN	
David Efendi, Agam Primadi	66
PERAN KOMUNITAS BELAJAR SABALAD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGANDARAN	
Kiki Endah, Endah Vestikowati	96

EFEKTIFITAS *MARKETING* DAN *BRANDING POLITICS* PARA
KANDIDAT KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Neng Suryanti Nengsih, Rendra Setyadiharja, Sharil Budiman, Suherry,
Raja Dachroni 113

PILKADA SEBAGAI PEMBENTUKAN POLITIK KEKERABATAN

Muhtar Haboddin 133

THE TRANSFORMATION OF CIVIC ENGAGEMENT : INDONESIAN
YOUTH PARTICIPATION

Mirza Hardian 147

KEMENANGAN PARTAI ACEH PADA PEMILUKADA GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH 2012 (Studi Tentang Perilaku Pemilih di
Kabupaten Aceh Selatan)

Mukhrizal, Titin Purwaningsih 163

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DIKELURAHAN
TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 KOMUNIKASI
POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Nur. A. Dwi Putri, Imam Yudhi Prastya 182

PARTISIPASI POLITIK SEMU DALAM PILKADA PONOROGO
TAHUN 2016

Jusuf Harsono 197

IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM
BERPOLITIK

Anip Dwi Saputro 205

PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DALAM <i>MANUNGGALING FIKIRAN LAN ATI ING DALEM SHOLAWAT</i> (MAFIA SHOLAWAT) STUDY FENOMENOLOGI PADA KELOMPOK MAFIA SHOLAWAT DI KABUPATEN PONOROGO	219
Dian Suluh Kusuma Dewi, Lilik Suntari	
KEARIFAN LOKAL KERAJAAN GALUH DALAM MEMBENTUK BUDAYA POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS	228
Dini Yuliani, R. Rindu Garvera	
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMETAAN HASIL EVALUASI PILKADA	239
Yusuf Adam Hilman	
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT	251
Khoirurrosyidin	
PENDAMPINGAN PROGRAM JALIN MATRA FEMINISASI KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR DI DESA BANDUNGAN, NGLANDUK, BODAG, SEGULUNG DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015	260
Nanang Cendriono	
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI SURAKARTA (2005-2012)	282
Muhamad Fajar Pramono	
UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MELAKUKAN PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN PONOROGO	292
Bambang Widiyahseno	

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KOMUNITAS SWALAYAN SURYA DI KECAMATAN PULUNG
SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK

Imam Mahfud 307

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2015

(STUDI DI DESA BUDUGSIDOREJO KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG)

Andi Setiawan, Nila Febri Wilujeng 318

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI
DESA HAMPARAN PERAK

Siti Hajar 330

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI BERBASIS PARTISIPASI
MASRARAKAT (Studi Kasus : Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta)

Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama 337

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA SUB
TEMA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Arif Zainudin, Unggul Sugiharto 353

MERAYAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Irma Fitriana Ulfah 370

STUDI IMPLEMENTASI AZAS TUGAS PEMBANTUAN DAN AZAS
PENUGASAN DALAM PENGUATAN DESA DI KABUPATEN
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Fernandes Simangunsong 384

UPAYA PUBLIC RELATIONS MELALUI PROGRAM CSR DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL - POLITIK DI MASYARAKAT	401
Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WISATA APUNG KAMPOENG RAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG	409
Agus Triyono, Muhammad Ali Masyhar	
C. KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU	
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK, POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK, MAKNA DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK	
Mohammad Ridwan	421
POLITIK PAPAN CATUR	
Persoalan Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur Serentak 2017	
Vellayati Hajad, Ikhsan	430
EKSISTENSI PERAN HUMAS (PUBLIC RELATIONS) PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	
Veri Setiawan	440
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011-2015)	
Dede Sri Kartini	452
DISKURSUS MEME DALAM EPISTEMOLOGI KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT DIGITAL	
Anang Hermawan	470

KOMUNIKASI POLITIK DAN PENANDA ZAMAN

(Studi *Branding* Kampanye Politik Indonesia)

Gregorius Genep Sukendro 483

KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL DALAM RITUAL WISUDA WAROK PONOROGO: SUATU KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Alip Sugianto 505

INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: TWITTER UNTUK KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Dzunuwanus Ghulam Manar 517

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI POLITIK GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANARKIS DALAM PILKADA

Ratna Setyarahajoe 537

KOMODIFIKASI *KOREAN WAVE* MELALUI MEDIA DAN IMPLIKASINYA PADA GAYA HIDUP REMAJA INDONESIA

Lusia Savitri Setyo Utami 560

PEMANFAATAN KARIKATUR SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK

Sigit Dwi Laksana 572

KOMUNIKASI POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL

H.H. Daniel Tamburian 583

IMPLEMENTASI DIGITAL PUBLIC RELATIONS (PR)	
(Studi Kasus : Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mensosialisasikan Tagline “Jogya Istimewa”)	595
Adhianty Nurjanah, Friski Yulianti Nurnisya	
PENGARUH PELAYANAN, FASILITAS DAN HARGA TERHADAP KETERTARIKAN PELANGGAN PADA CV. DOOR SMEER KINCLONG MEDAN	
Abdul Haris	613
D. MEDIA, INDUSTRI PROGRAM DAN JURNALISTIK	
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
DI DESA PALUH MANAN	
Irwan Syari Tanjung	643
SURAT KABAR DAN KONVERGENSI MEDIA (STUDI KASUS DI SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS)	
Anton Wahyu Prihartono	652
CERMIN RETAK DEMOKRASI: PERS DAN JURNALISME POLITIK “TANPA ISI”	
Hakim Syah	668
PENGARUH KONSUMSI MEDIA DAN INTERAKSI <i>PEERGROUP</i> TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH	
Fitri Norhabiba	684
PERAN MEDIA DALAM DUNIA DAKWAH	
Sutanto	695

CITRA NARSIS CAPRES 2014 DI MEDIA MASSA	
Muhammad Fadeli, Hadi Sutrisno	704
HUBUNGAN MEDIA PENENTU SUARA DALAM KAMPANYE POLITIK	
Nurudin	724
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN PERADABAN UNGGUL	
Rido Kurnianto	741
ANALISA MELEK POLITIK WARGA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014	
Studi Kasus: Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul DIY	
Rosalia Widhiastuti Sri Lestari	750
MAKNA SELFIE DALAM MEMBENTUK KARAKTERISTIK, CITRA, DAN IDENTITAS DIRI PADA IBU RUMAH TANGGA	
Dwi Kartikawati	778
PROSES KREATIF DESAIN SAMPUL BUKU DALAM MEMBANGUN <i>BRAND POSITIONING</i>	
Zein Mufarrih Muktaf	791
DI MANA RAKYAT JAKARTA DI MEDIA?	
(Kontruksi Sosial Warga Jakarta Jelang Pilgub DKI 2017 di Media Detik.com, Kompas.com dan Liputan6.com)	
Farid Rusdi	810

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP/ DALAM KOMUNIKASI POLITIK (Studi Kasus: Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau) Shahril Budiman, Azma Shafariani, Krisna	817
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: STUDI TENTANG URUSAN PENDIDIKAN DASAR Aos Kuswandi, Siti Nuraini	833
E. DINAMIKA PARTAI POLITIK	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT <i>MALPRACTICE</i> H. Ikhsan Yusda. PP	845
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS <i>E-GOVERNMENT</i> STUDI : PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN (UPIK) KOTA YOGYAKARTA Gerry Katon Mahendra	861
POTENSI DAN TANTANGAN PILKADA SERENTAK 2015 Audra Jovani	879
DEMOKRASI LOKAL : DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNGTERHADAP PERILAKU PEMILIH Syafhendry	888
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIBIYAI NEGARA KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU Desna Aromatica	898

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK (ANALISA PENGALAMAN POLITIK PADA PILPRES II PONOROGO TAHUN 2004)	
Happy Susanto	908
EVALUASI SOSIALISASI PEMILIHAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
Bismar Ariyanto	918
HARMONI SUNGAI DAN MANUSIA DALAM TRADISI MERTI CODE POLITIK PELESTARIAN SUNGAI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI YOGYAKARTA	
Suswanta	927
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL	
Ansar Suherman	935
MERAYAKAN SEPAK BOLA, MERAWAT SEJARAH, MEMBERITAKAN KOTA BERSAMA BAWAH SKOR	
Fajar Junaedi	945
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN (STUDI HADITH-HADITH RASULULLAH TENTANG <i>AL-IMAM</i> DAN <i>AL-IMAMAH</i>)	
Nurul Iman	960
GAYA KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: MEMBANGUN KOMUNIKASI ORGANISASI YANG EFEKTIF DI ERAMEA	
Joko Sutarso	968
TRADISI “TORON” : BENTUK KOMUNIKASI KELUARGA DAN KEARIFAN LOKAL MADURA	
Nikmah Suryandari	977

STUDI MODAL SOSIAL KELOMPOK PEREMPUAN PESISIR : UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MASYARAKAT PESISIR	
Andy Arya Maulana Wijaya	988
PERAYAAN GREBEG SURO SEBAGAI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA PONOROGO (ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA PONOROGO)	
Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih	1001
KOMPETENSI WARTAWAN MEDIA CETAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM	
Marlina	1014
 F. BUDAYA BIROKRASI	
KEKUASAAN CAPITAL : PERSOALAN RUANG PUBLIC (MEDIA) DAN KRISIS DEMOKRASI DI INDONESIA	
Puji Rianto	1029
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) TERHADAP KUALITAS ANAK DIDIK DI SDI PANGGENTUNGAN SELATAN KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA	
Nuryanti Mustari, Tahir Tuju	1040
PEREMPUAN DI BALIK POLITIK (ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI PERAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK DAN PENDUKUNG POLITIK PADA PILKADA 2015)	
Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi	1054
POPULARISME DAN PRAGMATISME TAK TERBENDUNG : SEBUAH REFLEKSI POLITIK TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015	
Idil Akbar	1074

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DI ERA PILKADA LANGSUNG	
Ayok Ariyanto	1090
PENATAAN GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS: PROGRAM PATEN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN)	
Suherry, Nurul hafizah, Nurhadiyanti	1101
REFORMASI BIROKRASI POLITISASI BIROKRASI PADA PILKADA DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2015	
Fathur Rahman	1115
AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
Sakir, Diah Mutiara, M. Eko Atmojo, Riska Sarofah	1127
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014	
Firmanto Latief	1146
REFORMASI BIROKRASI BIDANG PROMOSI JABATAN STUDI: PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
Muhammad Eko Atmojo, Ady Muzwardi, Sakir	1161
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK (STUDI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)	
Ombi Romli	1175
BUDAYA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON	
Anwar Sadat	1195

MENYEMBUNYIKAN POLITIK UANG DIBALIK PILKADA SERENTAK KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN	1209
Elly Nurlia	
<i>OPINION LEADER</i> DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK MASYARAKAT DESA DI INDONESIA	1220
Niken Lestsrini	
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR PERIKANAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
Rizky Nanda Hidayat, Rendra Setyidiharja, Zamzami A. Karim, Junriana	1225
REKRUITMEN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI REKRUITMEN CALON LEGISLATIF DAERAH PAN KABUPATEN PONOROGO)	1241
Titin Sarwenda, Sulton	

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK
(Analisa Pengalaman Politik pada Pilpres II Ponorogo tahun 2004)

Happy Susanto
Direktur Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Ponorogo
happysusanto@yahoo.com

PENGANTAR

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang cukup tua tentunya telah mengalami banyak pengalaman. Muhammadiyah telah banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat dalam melakukan pembinaan individu dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah telah banyak melakukan kontak dengan bentuk kebudayaan-kebudayaan baru yang silih berganti. Maka untuk setiap kontak dengan sesuatu yang baru akan selalu terjadi proses dialektika yang terus menerus antar satu dengan lainnya, yang dalam terminologi sosial Berger (1991) disebut dengan *eksternalisasi*, *obyektivasi* dan *internalisasi*.³⁰ Eksternalisasi adalah suatu aktivitas pencurahan diri ke dalam dunia baik fisik maupun mental. Obyektivasi berarti bahwa setelah melakukan pencurahan terhadap dunia ini, masyarakat berhadapan dengan prosedur tersebut, mereka bereaksi terhadap pencurahan itu dan mereka sebagai realitas eksternal yang berbeda. Sedangkan internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut yang kemudian ditransformasikan sekali lagi dari struktur kesadaran obyektif menuju kesadaran subyektif. Proses inilah yang terus akan mewarnai kehidupan manusia. Usaha menutup diri terhadap kemajemukan justru akan membuat kita tidak dewasa dan ketinggalan zaman. Ketiga proses diatas tersebut adalah dasar setiap manusia termasuk warga Muhammadiyah dalam berperilaku dan mengapresiasi setiap zamannya.

Warga Muhammadiyah yang cukup banyak ini merupakan komponen bangsa yang aktif memberikan kontribusi dan warna dalam dinamika kehidupan di Indonesia ini termasuk dinamika politik. Untuk melihat keterlibatan organisasi besar ini dalam panggung politik memang bukan hal mudah karena organisasi ini tidak memiliki partai yang resmi didirikan dan dijadikan sebagai satu-satunya tempat penyaluran aspirasi politik disamping itu sikap cair politik warga Muhammadiyah itu sendiri yang bisa berkiprah di mana-mana. Tulisan ini akan berusaha mengkaji posisi agama dan politik secara umum kemudian akan melihat secara

³⁰ Peter.L.Berger, 1991, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory Religion*, New York: Doubleday, hal. 1-2

historis melibatkan Muhammadiyah dalam politik dan secara praksis akan mengkaji keterlibatan Muhammadiyah dalam pilpres II khususnya di Ponorogo.

AGAMA DAN POLITIK

Agama dan politik adalah topik pembahasan dan perdebatan perenial dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dalam negara semaju Amerika pun diskursus tentang agama dan politik cukup menyita perhatian masyarakat. Jika membicarakan masyarakat agama maka kita tidak akan bisa melepaskan dari pembicaraan mengenai keterlibatannya dalam dunia politik. Maka untuk itu tak dapat disangkal lagi dalam negara yang bebas yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, agama merupakan faktor yang cukup besar sebagai daya penggerak keterlibatan masyarakatnya dalam politik.³¹ Pentingnya posisi agama dalam masyarakat menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi politisi untuk mencapai kekuasaan.

Memang sangat sulit untuk mengatakan manakah yang memiliki peran lebih penting antara agama dan politik dalam perubahan sosial. Dua hal ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat saling berkaitan. Seorang politikus akan melihat agama sebagai sarana untuk mencapai maksudnya. Demikian juga seorang agamawan akan melihat politik sebagai sarana yang potensial untuk mengembangkan agama. Bahkan saat ini banyak muncul politisi sekaligus agamawan, karena memang melihat pentingnya agama sebagai sarana pencapaian kekuasaan. Kita menyaksikan pada pemilu yang lalu banyak agama diposisikan sebagai sarana dan alat dalam monuver-monuver politik oleh kelompok tertentu.³² Penggunaan agama dalam politik yang selama ini dianggap sebagai wilayah profan bisa saja membuat politik memiliki akar religius sehingga aktivitas politik yang dilakukan seorang politikus selalu dikontrol oleh nilai-nilai agama yang dianutnya. Namun di sisi lain bisa saja terjadi politisasi agama yang mengakibatkan pendangkalan makna agama yang hanya dijadikan sebagai sarana pencapaian kekuasaan. Disamping itu bahaya yang lebih besar politisasi agama bisa menyebabkan perpecahan antar umat yang hanya dikarenakan aspirasi politiknya berbeda.

Secara sosiologis pentingnya agama dalam perubahan sosial pernah dijelaskan oleh Weber. Dunia Barat yang kapitalis ternyata tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan agama. Agama merupakan daya pendorong yang kuat bagi pemeluknya untuk mengkonstruksi

³¹ Robert Audi, 2000, *Religious Commitment and the Secular Reason*, New York: Cambridge University Press, hal. ix

³² Penggunaan agama sebagai sarana politik ataupun urgensi agama dalam dunia politik pernah diungkapkan oleh Faery Ali. Lihat Faery Ali, 1984, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, hal. 2-7

duniannya. Kapitalisme di Barat yang di analisa oleh Weber muncul dari sebuah sekte Protestant yang aktif yang bernama Calvinisme. Dengan doktrin internal yang disebut *beruf* (panggilan), Calvinisme mulai membangun dunia melalui perekonomian. Calvinisme yang mempercayai bahwa Tuhan telah menetapkan orang-orang yang telah dipilihnya dan dianugerahi rahmat, namun mereka tidak mengetahui siapa orang-orang yang terpilih tersebut. Maka untuk menghilangkan keraguan ini ia menunjukkan dengan semangat kerja dan kemapanan duniawi sebagai simbol bahwa mereka adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Melalui askese duniawi (*innerworldly asceticism*) yaitu mengalahkan dunia dengan menguasainya, Calvinisme merasa agama memiliki *beruf* dengan kerja sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa mereka telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai manusia pilihan. Kerja yang dulunya berada pada wilayah profan menemukan bentuknya yang religius dalam ajaran ini.³³

Dikaitkan dengan perkembangan sosial, kedudukan agama baik secara teologis maupun sosiologis, sebenarnya sangat mendukung proses pendemokrasian politik, ekonomi, dan kebudayaan. Semua agama besar dunia yang disebut sebagai agama Ibrahim (*Abrahamic Religion*) muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Menempatkan manusia pada hak dan kodratnya. Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan artinya nilai-nilai ketuhanan dijadikan sandaran nilai tertinggi maka politik Indonesia diharapkan menjadi sebuah politik yang tetap diwarnai nilai-nilai spiritual keagamaan. Politik yang selalu berbasis pada koridor moral dan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasandan dasar ideologi negara. Upaya ini hendaknya tidak dilihat sebagai *pemolitikan agama*, yaitu menjadikan isu-isu agama sebagai komoditas politik untuk memperoleh kekuasaan, tetapi lebih pada *pengagamaan politik*, yaitu upaya menjadikan agama sebagai alat untuk mengontrol para pelaku politik agar tidak terjebak dalam politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari agama selalu mengasumsikan terwujudnya keadilan dan kemerdekaan yang merupakan dasar dari hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya keadilan dan hak kemerdekaan manusia. Meski agama secara sistematis tidak mengajarkan praktik politik dan demokrasi, namun

³³ Weber melakukan penelitian bahwa ada kaitan erat antara kemunculan kapitalisme di Barat dengan salah satu sekte Protestan yaitu Calvin. Ia juga memberikan pernyataan bahwa agama-agama di dunia ini punya kaitan erat dengan perubahan sosial terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi. Lihat: Marx Weber, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Son. Lihat juga dalam: Taufik Abdullah, 1988, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES

agama mampu memberikan etos dan spirit yang mendorong terwujudnya tatanan iklim kehidupan yang demokratis. Maka bisa kita lihat di sini agama tidak saja memiliki tataran teologis-normatif namun agama juga memiliki dan memasuki wilayah sosiologis-politik.

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK

Sebagai organisasi massa yang besar, Muhammadiyah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perpolitikan di Indonesia. Secara historis keterlibatan banyak tokoh Muhammadiyah di Masyumi ternyata telah membawa warna tersendiri pada partai tersebut kala itu. Muhammadiyah juga selalu melakukan kontekstualisasi terhadap perubahan zaman. Sebagai gerakan, Muhammadiyah selalu mempunyai kepentingan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi-munkar*. Sebagai gerakan sosial Muhammadiyah berdakwah melalui pendirian berbagai jenis amal usaha untuk membangun masyarakat. Semua aktivitas ini dilakukan untuk mencapai tujuan dasar yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Sementara itu secara politis pada tahun 1971 dalam sidang Tanwir di Makasar ditegaskan bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dari semua partai politik yang ada. Muhammadiyah juga membebaskan warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai pilihan dan hati nuraninya masing-masing. *Khittah* ini bukanlah tanpa sejarah. *Khittah* itu lahir setelah Muhammadiyah ikut mendirikan Parmusi (Partai Muslim Indonesia) yang semula dimaksudkan untuk sebagai rehabilitasi politik Masyumi yang mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu disebabkan intervensi pemerintah yang sangat besar dan terjadinya konflik antar kader Muhammadiyah sendiri. Konflik antara Djarnawi Hadikusumo-Lukman Harun dan H.M.S. Mintaredja, tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Pengalaman ketika menjadi anggota istimewa Masyumi, juga menyebabkan kader-kader lainnya seperti Supeni dan Roeslan Abdulgani yang aktif di PNI, menjadi teranaktirikan. Maka dapat dipahami bahwa setelah munculnya keputusan Tanwir 1971 tersebut kita melihat Muhammadiyah sebagai organisasi menjaga jarak terhadap semua partai politik yang ada. Dengan tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik, membuat kader-kader Muhammadiyah bebas berkiprah dimana saja. Tidak mengherankan seperti pimpinan Muhammadiyah saat ini (Din Syamsudin) dulu pernah aktif dan menjadi pengurus pusat partai berlambang pohon beringin

TEMA : DINAMIKA PARTAI POLITIK

Setelah kejatuhan rezim Suharto, iklim demokrasi kita mulai berubah. Perubahan secara drastis terjadi di Indonesia, terutama di bidang politik. Saat kran demokrasi di buka, maka bermunculan partai-partai baru. Eforia politik ini juga melanda warga Muhammadiyah. Akhirnya salah satu tokoh Muhammadiyah yang cukup terkenal, Amin Rais mencalonkan diri menjadi presiden untuk menggantikan Suharto. Melalui PAN (Partai Amanat Nasional) yang didirikan bersama beberapa tokoh cendekiawan Indonesia seperti Gunawan Muhammad dan T.H. Sumartana, Amin Rais mengkapanyekan bahwa PAN adalah partai terbuka bagi siapa saja dan bukan partai eksklusif yang hanya milik orang Muhammadiyah saja. Namun tidak dapat dipungkiri dukungan terbesar partai berlambang matahari bersinar ini bersumber dari organisasi yang pernah dipimpin sebelumnya yaitu Muhammadiyah. Amin Rais merupakan sosok yang kharismatik bagi warga Muhammadiyah. Tutar katanya yang satun ternyata banyak memikat warga Muhammadiyah untuk mendukungnya, disamping ia memang piawai di bidang politik karena sebagai basis keilmuannya.

Kemunculan Amin Rais sebagai calon presiden ternyata membawa dilema tersendiri bagi Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah melakukan Tanwir di Bali tahun 2002 dan Makassar tahun 2003 berhasil membendung aspirasi sebagian warga untuk mendukung kadernya tersebut sebagai kandidat presiden. Saat itu, kepercayaan masyarakat pada Muhammadiyah yang independen bertambah besar. Netralitas ini patut diacungin jempol karena Muhammadiyah telah melakukan pendidikan politik dengan baik yaitu tidak membawa Muhammadiyah dalam wilayah politik praktis. Keberhasilan ini tidak bisa lepas dari figur Buya Syafi'i Ma'arif sebagai ketua organisasi ini. Namun akhirnya pada tahun 2004 organisasi besar ini yang semula netral akhirnya mengeluarkan ijtihad politik. Secara resmi Muhammadiyah mendukung sepenuhnya pencalonan Amien Rais sebagai presiden dalam Pemilu 2004. Muhammadiyah mengeluarkan *taushiyah* agar warganya memilih calon-calon anggota legislatif dan partai yang memberikan peluang besar dan langsung bagi terpilihnya kader terbaik Muhammadiyah dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004. Bagi Amien Rais, Muhammadiyah tidak hanya memberikan tiket dan kendaraan tetapi juga jalan lampang menuju istana kepresidenan.

Pemberian dukungan resmi Muhammadiyah itu, didasarkan pada alasan subjektif karena Amien Rais pernah menjadi ketua umum dan merupakan kader terbaik persyarikatan ini. Selain itu, alasan objektifnya adalah bahwa Amien Rais adalah tokoh reformasi yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita reformasi menuju demokrasi di Indonesia tercinta ini.

Maka, dengan keanggotaan Muhammadiyah yang hampir mencapai 15 juta dan tersebar di banyak partai, diharapkan pada pemilu presiden 5 Juli semua warganya akan menaati keputusan itu dan memilih Amien Rais

Ijtihad politik Muhammadiyah merupakan fatwa yang secara struktural dan moral mengikat semua warga Muhammadiyah. Meskipun demikian, ijtihad tersebut menimbulkan polemik, bahkan dalam internal Muhammadiyah sendiri. Kelompok kontra menilai Muhammadiyah telah keluar dari khittah sebagai gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Muhammadiyah mulai kehilangan independensi gerakan karena melakukan kegiatan politik praktis. Pada sisi lain, pihak yang setuju menyatakan dukungan kepada Amien Rais merupakan keputusan natural dan netral. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan pengkajian yang mendalam terhadap dinamika politik kenegaraan. Polemik fatwa resmi Muhammadiyah untuk mendukung Amien Rais yang dikeluarkan di Yogya, menimbulkan riak-riak konflik di interna Muhammadiyah. Hal itu terlihat pada kasus gugatan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) terhadap pernyataan PKS yang didukung beberapa pengurus Muhammadiyah di harian *Kedaulatan Rakyat* sebelum pemilu 5 April lalu. Protes serupa juga datang dari warga Muhammadiyah yang juga aktif di PPP, Golkar, atau PBR yang merasa dianaktirikan setelah lahirnya keputusan resmi tersebut. Pernyataan sikap JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang menggugat dukungan resmi itu dengan alasan pelanggaran *khittah*.³⁴ Disamping itu dukungan ini juga memunculkan kembali terminologi lama yang sudah mulai dilupakan orang namun menjadi segar kembali setelah fatwa tersebut muncul, yaitu bangkitnya politik aliran. Jika ini memang terjadi justru bukan kemajuan politik yang terjadi melainkan kemunduran politik. Munculnya ancaman politisasi terhadap agama.³⁵

Inilah keunikan partai ini. Meski muncul ijtihad politik tersebut di atas namun ternyata PAN hanya menduduki urutan ke tujuh dalam pemilihan legislatif 2004. Slogan sebagai partai terbuka dan di komandani oleh tokoh yang dikenal sebagai figur reformis ini ternyata belum banyak memikat hati rakyat. Suara PAN malah terbukti ambrol dan kalah dengan pendaatang

³⁴ Uraian lebih lengkap mengenai ini dapat dilihat dalam Ahmad Fuad Fanani yang berjudul "Menyoal Konsistensi "Khittah" Muhammadiyah dalam Kompas Cyber Media (KCM) 2004, maupun dalam artikelnya yang berjudul "Syahwat" Politik Muhammadiyah di <http://Islamlib.com> 24 Mei 2004.

³⁵ Istilah politik aliran ini sebenarnya dikaitkan dengan hasil penelitian antropolog Clifford Geertz tentang trikotomo sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Jawa dalam ketiga varian yaitu santri, priyayi, dan abangan. Lebih lanjut lihat dalam Clifford Geertz, 1960, *The Religion of Java*, Chicago: London.

baru seperti Partai Demokrat, bahkan posisinya di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan beberapa contoh itu, dapat diambil pelajaran bahwa meski pengurus Muhammadiyah mengajak secara resmi warganya untuk memilih partai tertentu, mereka tetap memiliki pilihan sendiri yang diyakininya.

Kekalahan PAN ini sebenarnya terjadi diantaranya karena kesalahan pembacaan terhadap realitas politik, terutama kepada warga Muhammadiyah. Kultur politik warga Muhammadiyah yang dulunya cair dan terkotak-kotak diberbagai partai politik kini disamaratakan. Terjadi generalisasi yang berlebihan (*over generalization*) terhadap warga Muhammadiyah dimana jika keyakinan religius disamakan dengan keyakinan politik, meski hal ini tidak dipungkiri juga saling berkaitan. Kesalahan pembacaan ini karena, dalam terminologi Al-Jabiri, mereka menggunakan metode berfikir *bayani* (tekstual). Dalam model berpikir ini, semua hal dipandang secara tekstual, material, dan konkret. Semua akan dilihat sebagai hitam-putih dan otomatis. Karena Amien Rais merupakan mantan ketua PP Muhammadiyah dan kader terbaiknya, maka semua orang Muhammadiyah pasti akan mendukungnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Penyamaan aspirasi politik di Muhammadiyah memang tidaklah mudah karena secara historis organisasi ini memang tidak berafiliasi terhadap partai tertentu (sesuai *khittah* 1971) dan secara kultur anggota organisasi ini telah mengalami pluralitas politik. Mereka tersebar di berbagai partai politik yang ada. Menghadapi pluralitas politik ini maka pembacaan politik ke depan harus menggunakan metode rasional (*burhani*) dan imajinatif (*irfani*).³⁶

PENGALAMAN POLITIK MUHAMMADIYAH PONOROGO DALAM PEMILU LEGISLATIF II TAHUN 2004

Muhammadiyah di Ponorogo lahir pada tahun 1922, sebuah umur yang cukup tua bagi gerakan sosial keagamaan. Tidak heran jika Muhammadiyah banyak memiliki pengikutnya di sini, untuk itu Ponorogo juga termasuk kantong Muhammadiyah yang cukup besar di Jawa Timur. Kondisi umum perpolitikan Muhammadiyah diatas ternyata juga terjadi di Ponorogo. Pada pemilu legislatif yang lalu kader-kader Muhammadiyah tersebar di mana-mana. Pluralitas politik ini karena tiga hal. *Pertama* secara historis memang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan menjaga jarak dengan partai politik yang ada. Demikian Muhammadiyah memberikan kebebasan bagi warganya untuk memilih partai yang dikehendaknya. Kondisi

³⁶ M. Abid Al-Jabiri, 1993, *Bunyah al-'Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah Li al-Nudzum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafah al-Araby.

umum ini juga terjadi di Ponorogo. Sebagai warisan kultur yang memiliki sejarah yang panjang, maka hal ini susah untuk diubah. Meski PAN didirikan oleh kader-kader Muhammadiyah bahkan oleh mantan ketuanya sekalipun, ternyata belum mampu menjadi pemersatu aspirasi warga Muhammadiyah. *Kedua*, secara filosofis Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid yang ingin melakukan purifikasi terhadap penyimpangan terhadap akidah. Sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah sangat erat dengan model berfikir yang terbuka. Keterbukaan pemikiran ini pada masa awal berdirinya organisasi ini justru di tunjukkan oleh pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan ketika menerima pimpinan *Indisch Sociaal Democratische Partij* (ISDV) sebuah partai yang didirikan di Semarang pada tahun 1914 yang kemudian di berkembang menjadi Partai Komunis. Pemimpin ISDV, Darsono dan Semaun, diizinkan untuk berbicara dihadapan warga Muhammadiyah untuk menentang kebijakan represif pemerintah Belanda dan mengkampanyekan ide-ide sosialisme.³⁷ (Jainuri, 2002: 115). Keadaan ini menunjukkan bahwa KH Ahmad Dahlan memiliki sifat keterbukaan terhadap kebenaran dari manapun asalnya. Keterbukaan pemikiran ini juga beimbis pada keterbukaan terhadap pilihan politik. Warga Muhammadiyah bebas memilih partai yang dianggapnya mewakili nuraninya dan memnyarakan kebenaran. *Ketiga*, Muhammadiyah lahir dari kelas menengah atau kelas pedagang. Kelas ini merupakan kelas masyarakat terdidik yang menggunakan pola berfikir yang rasional.³⁸ Karena pertimbangan rasional dan matematis menentukan tingkat keuntungan dan kerugian termasuk dalam dunia politik. Meskipun PAN didirikan oleh kader Muhammadiyah dan siap menampung aspirasi warga Muhammadiyah namun karena pertimbangan yang rasional akhirnya warga Muhammadiyah tidak semua bergabung dengan partai ini. Dari ketiga pertimbangan inilah, tidak mengherankan jika warga Muhammadiyah dalam pilihan politiknya bersifat cair dan plural.

Data di Ponorogo menyebutkan bahwa dari 45 kursi DPRD yang disediakan pemerintah, ternyata hanya di isi oleh 3 orang dari PAN. mereka itu adalah: Suparno SH, Wihananto, dan Puryono. Dalam pemilu legislatif 2004, daerah basis Muhammadiyah seperti Kecamatan Kota, perolehan PAN jauh berada dibawah partai lama seperti Partai Golkar dan PDIP. Di kecamatan ini PAN hanya memperoleh 3841 suara sementara itu partai Golkar mendapat suara 9.065 dan PDIP sebanyak 8.215. Ironisnya ditempat ini pula partai pendatang baru yaitu Partai Demokrat dan juga PKB meninggalkan perolehan PAN tersebut. Partai

³⁷ Ahmad Jainuri, 2002, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Awal Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), hal. 115

³⁸ Ibid: hal, 85

TEMA : DINAMIKA PARTAI POLITIK

Demokrat mendapat suara 6.218 dan PKB mendapat 7.214. Kondisi ini juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang dianggap menjadi basis Muhammadiyah. Sama dengan kecamatan Kota, di kecamatan Jetis PAN hanya menempati urutan empat setelah PDIP, Golkar, dan PKB. Demikian juga di kecamatan Mlarak perolehan PAN jauh dibawah Fenomena kekalahan PAN ini terjadi secara merata di Ponorogo apalagi di kecamatan-kecamatan selain basis Muhammadiyah. Cairnya politik Muhammadiyah Ponorogo ini tidak saja dalam pemilu legislatif namun juga dalam pilpres I dimana Amin Rais masih menjadi kontestan calon presiden.

Di samping ketiga sebab di atas, ketidaktertarikan warga Muhammadiyah terhadap calon wakil legislatif di 2004 adalah adanya krisis kepercayaan dan ketidaktahuan terhadap calon yang ingin dipilihnya. Krisis kepercayaan ini disebabkan karena *track-record* DPR secara umum maupun DPRD sudah sangat merosot di kalangan masyarakat, disamping juga telah terjadi rasionalisasi politik di kalangan masyarakat. Sementara itu ketidaktahuan masyarakat terhadap calon yang akan dipilihnya juga sangat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Distribusi caleg yang tidak tepat bisa menjadi sebab kegagalan dalam pemilu legislatif ini. Banyak caleg yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang justru terpasang pada urutan atas sementara caleg yang dikenal dipasang pada urutan bawah atau justru terpasang pada Daerah Pemilihan (DP) yang lain.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pluralnya pilihan politik warga Muhammadiyah bukannya tanpa memiliki sejarah. Sisi sejarah ini ternyata memiliki ikatan yang cukup kuat sehingga meski muncul ijtihad politik untuk mendukung pencalonan Amin Rais menjadi presiden atau memilih wakil-wakilnya di legislatif, ternyata jatuhnya pilihan politik warga Muhammadiyah tetap beragam. Disamping organisasi ini menjaga jarak dengan semua partai politik yang ada Muhammadiyah juga merupakan bentuk gerakan pembaharuan yang memiliki model berfikir yang terbuka dan rasional. Keterbukaan ini memberikan peluang terhadap pilihan politik yang dianggap cocok dengan aspirasinya masing-masing sementara itu rasionalisasi pemikiran memberikan pertimbangan matematis tentang keuntungan dan kerugian dalam sebuah pilihan politik. Maka dari itu generalisasi pembacaan yang dilakukan akan banyak mengalami hambatan dalam situasi yang plural tersebut.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri dari keberadaan organisasi besar ini adalah Muhammadiyah telah banyak melakukan transformasi sosial. Sebagai gerakan *ámar ma'ruf*

nahi munkar Muhammadiyah telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan bangsa ini. Karena perannya yang cukup besar gerakan ini. telah memancing banyak komentar dari berbagai kalangan. Wertheim menyimpulkan ideologi Muhammadiyah paralel dengan ideologi kaum borjuasi di Eropa, terutama gerakan Calvinisme puritan. Geertz menegaskan analisa ini dengan mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dengan tingkat rasionalisasi yang sangat tinggi yang menjadi basis bagi etos *homo-economicus*.³⁹ Muhammadiyah merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan Indonesia baru yang kita ingin kan bersama. Untuk itu sebagai gerakan sosial keagamaan, seyogyanya Muhammadiyah selalu membuka diri dan mampu berdialog dengan perubahan zaman. Pembinaan terhadap umat tidak saja dilakukan kepada kader-kadernya saja namun juga terbuka bagi kelompok lain. Sudah waktunya saat ini Muhammadiyah berkonsentrasi juga pada persoalan-persoalan kemanusiaan, petani, buruh, pemberdayaan perempuan, kemiskinan serta persoalan kemanusiaan lainnya. *Wallhua'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1988, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES
- Ali, Facyr , 1984, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara
- Audi, Robert, 2000, *Religious Commitment and the Secular Reason*, New York: Cambridge University Press
- Berger, Peter.L, 1991, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory Religion*, New York: Doubleday
- Fanani, Ahmad Fuad, 2004, *Menyoal Konsistensi "Khittah" Muhammadiyah*, dalam Kompas Cyber Media (KCM)
- Geertz, Clifford, 1960, *The Religion of Java*, Chicago: London.
- Greenawalt, Kent, 1988, *Religious Convictions and Political Choice*, New York: Oxford University Press
- Jainuri, Ahmad, 2002, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Awal muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM)
- Al-Jabiri, M. Abid, 1993, *Bunyah al-'Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah Li al-Nudzum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafah al-Araby.
- Kuntowijoyo, 1993, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan
- Weberz Marx, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: ChrlesScribner's Son

³⁹ Kuntowijoyo, 1993, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, hal. 224



MUHAMMADIYAH UNIVERSITY
OF PONOROGO

REKTORAT

